

PATH DEPENDENCY DALAM BIROKRASI PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Choesyana Yulian Maharani
NPP. 32.0164

*Asdaf Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: choesyany15@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Selvi Diana Meilinda, S.AN., MPA.

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The process of formulating regional regulations in West Lombok Regency still faces various obstacles, resulting in prolonged durations for drafting such regulations. Additionally, the complex bureaucratic structure and suboptimal use of digital applications have led to low levels of transparency and public participation in the regulatory process. **Purpose:** This study aims to analyze the influence of bureaucratic structures and procedural stages on the duration of regional regulation formulation in West Lombok Regency, as well as to examine the flexibility of the legislative process in shaping bureaucratic path dependency within the context of regional autonomy. **Method:** This research employs a case study method to conduct a comprehensive investigation of a specific event. The data sources include events, documentation, and three key informants. Data collection techniques consist of field research through observation, interviews, and documentation, along with literature review. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The findings indicate that bureaucratic structures and procedural stages influence the duration of regional regulation formulation, with rigid patterns identified. Furthermore, the legislative practice in West Lombok Regency continues to exhibit path dependency, particularly in the use of the e-Perda application. **Conclusion:** The process of formulating regional regulations in West Lombok Regency remains dominated by rigid bureaucratic patterns and path dependency, which hinder efficiency and innovation in legislative practices.

Keywords: Regional Regulation, Bureaucracy, e-Perda, Path Dependency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan dibutuhkan durasi yang panjang dalam pembuatan peraturan tersebut. Selain itu, struktur birokrasi yang kompleks dan penggunaan aplikasi digital yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga transparansi dan partisipasi

dalam pembuatan peraturan daerah masih rendah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh struktur dan tahapan birokrasi pada durasi pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat serta untuk menganalisis fleksibilitas proses legislasi peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat dalam membentuk *path dependency* birokrasi dalam otonomi daerah. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap suatu kasus yang terjadi pada suatu kejadian tertentu. Sumber data yang digunakan adalah peristiwa, dokumentasi dan narasumber yang berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh struktur dan tahapan birokrasi terhadap durasi pembuatan peraturan daerah dimana terdapat pola-pola kaku. Selain itu praktik legislasi di Kabupaten Lombok Barat yang masih menunjukkan bentuk ketergantungan jalur terutama dalam penggunaan aplikasi e-perda. **Kesimpulan:** Proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat masih didominasi oleh pola birokrasi yang kaku dan ketergantungan jalur (*path dependency*) yang mana hal tersebut menghambat efisiensi dan inovasi dalam praktik legislasi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Birokasi, e-Perda, *Path Dependency*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki otonomi yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang terkait sebagai hak dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Pemberian otonomi daerah kepada suatu daerah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan nilai, tradisi, adat dan istiadat setempat bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang kemudian melahirkan pemerintah yang diktator (Dr. Halilul Khairi et al., 2022). Otonomi daerah berlaku dengan memberikan kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah diluar kewenangan urusan pusat (Dona, 2022). Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur berbagai sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang diatur lebih lanjut melalui produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda). Proses pembentukan Perda diatur secara sistematis melalui tahapan mulai dari perencanaan hingga pengundangan, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan Perda menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya manusia, dan pengaruh kepentingan politik. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan keterlambatan penerbitan Perda di banyak daerah. Peraturan yang terlambat diterbitkan berdampak pada ketidakpastian hukum dan terganggunya pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu mempercepat dan mempermudah proses legislasi daerah dimana pembuatan kebijakan juga harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat membantu birokrasi dalam memecahkan permasalahan publik (Indiahono, 2021).

Revolusi digital telah meningkatkan komunikasi, pengelolaan data, dan pemberian layanan secara signifikan (Lukman & Hakim, 2024). Selain itu, adanya tuntutan reformasi birokrasi yang dimulai sejak Tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 yang menjadi tantangan baru bagi pemerintah (Madjid, 2021). Dibutuhkan penyederhanaan struktur birokrasi yang membuat sistem dan pelayanan yang lebih efisien yang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah

Indonesia (Rohman, 2021). Reformasi birokrasi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sumber daya aparatur yang memiliki integritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima (Fernandes, 2024). Dengan berkembangnya *e-government* menjadi salah satu bentuk inovasi dalam menjawab tantangan yang ada dengan bantuan teknologi berbasis digital (Mukminto, 2023). Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis digital (Wasistiono, 2021). Sebuah inovasi berbasis digital yang dilakukan pemerintah demi menjawab tantangan zaman yaitu penggunaan aplikasi e-Perda untuk memfasilitasi proses penyusunan Perda secara lebih cepat dan transparan. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun potensial, implementasi e-Perda masih menghadapi kendala seperti kurangnya infrastruktur teknologi, keterbatasan pemahaman pegawai terhadap sistem digital, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan partisipasi publik masih rendah (Nurvanza, 2023).

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu pengguna e-Perda menunjukkan tren penurunan jumlah Perda yang diterbitkan sejak sistem ini diimplementasikan. Penurunan tersebut berpotensi memunculkan masalah baru, seperti ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal serta lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan masih kuatnya *path dependency* dalam sistem pemerintahan, di mana pola birokrasi lama tetap memengaruhi sistem baru, sehingga menciptakan dinamika zig-zag antara desentralisasi dan sentralisasi. *Path dependency* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pertimbangan atau keputusan yang dilakukan berdasarkan kejadian di masa lalu (Molla, 2020). Sistem ini ditafsirkan sebagai hasil jangka panjang atau akhir dari sebuah sistem (Mark Setterfield, 2015). Menurut Hans Keman dan Jaap J. Woldendorp, *path dependency* merupakan peristiwa atau keputusan yang dibuat di masa lalu yang menentukan dan seringkali membatasi ruang untuk bermanuver di masa depan (SCHMITTER, 2016). Teori ini menggambarkan pola pikir dimana: (1) manusia membangun keyakinan untuk memodelkan rasionalitas; (2) keyakinan dominan membentuk kinerja masyarakat; (3) suatu institusi membatasi pilihan ketika mereka berusaha mendesain ulang dan mengubahnya; dan (4) perubahan terjadi karena persepsi realitas dimana pihak dominan mendesain ulang dan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka (Hamidov, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan menyeluruh baik dari sisi budaya birokrasi maupun dukungan teknis agar otonomi daerah dan sistem legislasi lokal dapat berjalan lebih optimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan peraturan daerah yang sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 120 Tahun 2018. Berbagai inovasi salah satunya pemanfaatan digitalisasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada masih menemui tantangan yang menghambat efektivitas proses legislasi di daerah khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Penurunan jumlah peraturan daerah yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir semenjak berjalannya aplikasi e-Perda menjadi jawaban bahwa penggunaan aplikasi tersebut belum menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi persoalan struktur dan tahapan birokrasi, koordinasi antar lembaga dan partisipasi publik.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek normatif, peraturan formal, atau kondisi ideal yang diatur dalam perundang-undangan tanpa menggali secara mendalam faktor-faktor implementatif dan struktural yang mempengaruhi kinerja proses legislasi di tingkat lokal. Kurangnya studi yang mengevaluasi dampak konkret dari penerapan e-Perda terhadap efektivitas pembentukan peraturan daerah menjadi kekosongan akademik yang perlu diisi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan konteks pembahasan yang sama baik dalam konteks proses pembuatan peraturan daerah, koordinasi antar aktor pembuatan peraturan daerah dan *path dependency*. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Bindler dan Randi Hjalmarsson yang berjudul *Path Dependency in Jury Decision Making*, menemukan bahwa terdapat keterkaitan antara keputusan juri dengan kasus-kasus sebelumnya dimana keputusan juri memiliki bias perilaku atau faktor-faktor di luar kasus itu sendiri (Bindler & Hjalmarsson, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Roxana Radu dan Cedric Anon yang berjudul *The Governance of 5G infrastructure: Between Path Dependency and Risk-Based Approaches* menemukan bahwa terdapat pengaruh teori ketergantungan jalur atau *path dependency* oleh negara multilateral seperti Uni Eropa (UE) untuk melakukan pelarangan preventif terhadap vendor 5G Tiongkok berdasarkan negara lain dengan keanggotaan yang sama (Radu & Amon, 2021). Penelitian Rini Andriani yang berjudul *Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tegal* menemukan bahwa peran aktif yang dicapai oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tegal dengan capaian kinerja yang sangat baik dalam proses pembentukan produk hukum daerah (Al-Azam et al., 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Listia Rika Tini dan Nur Inna Alfiyah yang berjudul *Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Periode 2019-2024 Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah* menemukan bahwa penggunaan hak inisiatif oleh Anggota DPRD Kabupaten Sumenep masih belum optimal mempengaruhi proses pembuatan peraturan daerah (Dwi et al., 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Abbie-Gayle Johnson dan dipublikasikan pada tahun 2023 di jurnal *Current Issues in Tourism* berjudul *Why are smart destinations not all technology-oriented? Examining the development of smart tourism initiatives based on path dependence* yang menemukan bahwa transformasi destinasi menuju *smart* sangat dipengaruhi oleh keputusan dan praktik masa lalu yang telah terkunci (*locked-in*), terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan di Ljubljana, Slovenia (Johnson, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji secara khusus dampak implementasi aplikasi *e-Perda* terhadap penurunan jumlah penerbitan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat setelah tahun 2021, suatu aspek yang belum banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya memotret proses formil pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menyoroti tantangan praktis dan kultural dalam birokrasi daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap digitalisasi, serta hambatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan menganalisis penurunan jumlah perda pasca-implementasi *e-Perda* dan mengaitkannya dengan teori *path dependency*, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa modernisasi sistem hukum daerah belum tentu secara otomatis meningkatkan efektivitas legislasi lokal tanpa kesiapan struktural dan budaya birokrasi yang mendukung.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur dan tahapan birokrasi pada durasi pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat serta menganalisis fleksibilitas

proses legislasi peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat dalam membentuk *path dependency* birokrasi dalam otonomi daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, serta mengamati karakteristik beberapa individu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Ria Fiantika et al., 2022).

Peneliti mengumpulkan data dengan 2 teknik pengumpulan yaitu penelitian lapangan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta penelitian kepustakaan berupa material bacaan. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat (sebanyak 2 orang) dan Staf Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Dewan Kabupaten Lombok Barat. Adapun analisisnya menggunakan teori *path dependency* yang digagas oleh Bengtsson & Ruonavaara (Bengtsson & Ruonavaara, 2010) yang menyatakan bahwa *path dependency* merupakan suatu perspektif dan metodologi yang didasarkan pada beberapa pendekatan yaitu; (1) Suatu peristiwa dimana dipilih berdasarkan jalur historis; (2) Proses pengambilan keputusan; dan (3) Mekanisme yang menjelaskan pengambilan keputusan (Malpass, 2011).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis struktur dan tahapan birokrasi dalam mempengaruhi durasi pembuatan peraturan daerah serta bagaimana fleksibilitas dalam proses legislasi peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat dalam membentuk *path dependency* atau ketergantungan jalur.

3.1 Struktur Dan Tahapan Birokrasi Pada Durasi Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Barat

A. Struktur dan Tahapan Birokrasi dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Struktur organisasi merupakan pola formal yang mengelompokkan orang dan pekerjaan serta mengatur hubungan antar sub-unit dalam organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Veithzal Rivai. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menganut bentuk struktur organisasi lini, staf, dan fungsional, yang ditandai dengan garis komando vertikal yang jelas, keberadaan unit staf sebagai pendukung pengambilan keputusan, serta pembagian tugas berdasarkan fungsi atau kompetensi tertentu. Kompleksitas struktur ini memengaruhi efektivitas proses legislasi, khususnya dalam pembuatan peraturan daerah, karena alur komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi panjang dan berpotensi menimbulkan keterlambatan, tumpang tindih kewenangan, serta miskomunikasi antar unit. Hasil wawancara dengan staf Bagian Hukum menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan daerah yang diterbitkan cenderung bersifat delegatif dari pemerintah provinsi, bukan berasal dari inisiatif daerah sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan struktural dan birokratis yang tinggi, yang berdampak pada minimnya inovasi legislasi lokal dan dominasi usulan eksekutif serta instruksi pemerintah pusat dalam proses legislasi di Kabupaten Lombok Barat.

B. Durasi Proses Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Barat

Proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat mengikuti tahapan birokrasi yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2024, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, hingga pengundangan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang melibatkan DPRD dan pemerintah daerah. Penyusunan rancangan dilakukan oleh OPD terkait atau DPRD, yang jika diperlukan, disertai naskah akademik. Proses pembahasan berlangsung melalui forum DPRD seperti rapat komisi dan panitia khusus, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, dan terakhir pengundangan oleh bupati. Beberapa instansi yang terlibat dalam proses ini meliputi DPRD, Bupati, Sekretariat Daerah, Bappeda, Bagian Hukum, dan OPD terkait.

Dalam praktiknya, proses evaluasi Ranperda dilakukan melalui aplikasi e-Perda yang dikembangkan Kemendagri sejak 2021. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti dashboard, analisis kebutuhan Perda, Propemperda, e-konsultasi, permohonan nomor registrasi, layanan pengguna, e-persetujuan, dan pusat bantuan. Meski demikian, Kabupaten Lombok Barat baru memanfaatkan sebagian fitur, terutama persetujuan Ranperda. Beberapa kendala dalam pembentukan Perda mencakup lamanya proses harmonisasi dengan Kemenkumham yang masih dilakukan manual, evaluasi di e-Perda yang belum optimal, hingga sulitnya menjadwalkan koordinasi antar anggota DPRD. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan jumlah Perda yang diterbitkan karena keterbatasan anggaran, yang dialihkan untuk penanganan krisis kesehatan dan ekonomi.

3.2 Fleksibilitas Proses Legislasi Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Barat Dalam Membentuk *Path Dependency* Birokrasi Dalam Otonomi Daerah

Fleksibilitas dalam proses legislasi merujuk pada kemampuan sistem hukum daerah untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, politik, dan hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat, fleksibilitas ini dipengaruhi oleh kecenderungan ketergantungan jalur (*path dependency*). Berdasarkan

1. Suatu Peristiwa Dimana Dipilih Berdasarkan Jalur Historis

Penelitian menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Ranperda yang diajukan dan disahkan hampir seluruhnya berasal dari usulan eksekutif, khususnya sebagai tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi atau arahan pemerintah provinsi. Hal ini membatasi inisiatif dari DPRD dan memperkuat dominasi eksekutif dalam proses legislasi. Selain itu, meskipun telah tersedia aplikasi e-Perda sebagai instrumen digitalisasi proses legislasi, penggunaannya masih terbatas dan lebih bersifat administratif daripada substantif. Pola historis ini membentuk mekanisme yang cenderung mempertahankan status quo, sehingga peraturan yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 juga turut memengaruhi proses legislasi, terutama melalui pemotongan anggaran yang menyebabkan penurunan jumlah Perda yang diterbitkan. Dengan demikian, fleksibilitas legislasi di Lombok Barat masih terhambat oleh pola-pola lama dan ketergantungan terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Tabel 4. 1 Daftar Register Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah	Keterangan
1	2020	7	Diterbitkan tanggal 2 April – 30 Desember 2020
2	2021	6	Diterbitkan tanggal 22 April – 30 Desember 2021
3	2022	5	Diterbitkan tanggal 18 Januari – 30 Desember 2022
4	2023	7	Diterbitkan tanggal 15 Januari – 29 Desember 2023
5	2024	5	Diterbitkan tanggal 6 Agustus – 30 Desember 2024

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 4. 2 Daftar Register Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah	Keterangan
1	2015	15	Diterbitkan tanggal 24 Juni – 17 Desember 2015
2	2016	13	Diterbitkan tanggal 7 April – 28 Desember 2016
3	2017	10	Diterbitkan tanggal 28 Februari – 2 Agustus 2022
4	2018	12	Diterbitkan tanggal 7 Januari – 25 Desember 2018

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

2. Proses pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat diwarnai oleh struktur birokrasi yang kompleks, dominasi eksekutif, serta hambatan koordinasi antar lembaga. Proses legislasi memakan waktu 3–4 bulan karena harus melalui berbagai tahapan seperti konsultasi ahli, uji publik, harmonisasi dengan Kemenkumham, dan evaluasi melalui Kemendagri menggunakan aplikasi e-Perda. Namun, sistem digital ini belum efektif karena evaluasi tetap harus dilakukan secara manual. Selain itu, padatnya jadwal para pejabat dan perbedaan waktu antar anggota dewan menyebabkan keterlambatan koordinasi, yang berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan dan minimnya inovasi dari staf.

Dalam praktiknya, norma dan kebiasaan yang terbentuk menunjukkan bahwa penyusunan peraturan daerah lebih bersifat administratif dan formalitas semata. Usulan dari DPRD atau perangkat daerah seringkali dialihkan menjadi Peraturan Bupati karena prosesnya lebih cepat dan tidak membutuhkan harmonisasi dengan pemerintah pusat. Hal ini memperkuat pola *top-down* dalam pembuatan kebijakan dan mengurangi ruang partisipasi legislatif serta publik. Akibatnya, banyak substansi kebijakan yang seharusnya penting justru tertunda atau tidak diterbitkan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak selalu mampu merespon kebutuhan dan dinamika sosial di daerah.

3. Mekanisme yang menjelaskan Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat dipengaruhi oleh norma atau kebiasaan birokratis yang menitikberatkan pada prosedur formal dan aspek administratif. Penggunaan aplikasi e-Perda, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk digitalisasi, pada praktiknya hanya menjadi formalitas karena masih diperlukan koordinasi manual melalui pengiriman dokumen fisik ke Kemendagri. Selain itu, proses legislasi didominasi oleh usulan eksekutif, sedangkan inisiatif dari DPRD atau perangkat daerah sering kali dialihkan menjadi Peraturan Bupati karena lebih mudah dan cepat diproses tanpa perlu harmonisasi dan evaluasi dari pemerintah pusat.

Beberapa faktor yang membentuk norma tersebut antara lain adalah kecenderungan birokrasi untuk memprioritaskan delegasi dari pemerintah pusat serta lamanya proses penyusunan peraturan daerah yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. Dampaknya, banyak regulasi penting yang justru tertunda atau bahkan tidak diterbitkan karena tidak melalui jalur prioritas. Evaluasi dan harmonisasi yang seharusnya menjamin kualitas substansi peraturan juga tidak berjalan efektif karena hanya bersifat administratif. Hal ini mengakibatkan regulasi yang diterbitkan kurang mampu merespons dinamika dan kebutuhan lokal secara optimal.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai struktur birokrasi, norma kerja dan kebiasaan administratif serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dalam proses legislasi di daerah terkhususnya di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Nurvanza, 2023) yang lebih menyoroti bagaimana *output* dari suatu regulasi atau aspek legalitas secara formalnya, penelitian ini dilakukan dengan lebih memperhatikan kepada hambatan koordinatif yang dihadapi dalam proses legislasi termasuk kepada proses yang dilakukan secara *top-down* atau sistem yang didominasi oleh usul eksekutif.

Penelitian ini merupakan bentuk analisis kritis terhadap efektivitas pengaplikasian sistem digital pada pelayanan yang diberika oleh pemerintah melalui e-Perda. Meskipun e-Perda merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi proses dan prosedur yang panjang dalam pembuatan peraturan daerah, namun dalam praktiknya aplikasi ini masih belum optimal. Penelitian ini memberikan prespektif baru yaitu menganalisis data yang ada dengan pendekatan teori *path dependency*. Teori ini dapat memberikan cara pandang baru dalam mengamati permasalahan atau fenomena yang terjadi khususnya dalam pelayanan pemerintah.

Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan daerah tidak hanya disebabkan oleh prosedur teknis, namun juga terdapat faktor lain yaitu struktur dan pola kerja yang kemudian menjadi budaya atau kebiasaan suatu organisasi. Pada hal ini, pola yang terjadi berupa usulan eksekutif yang lebih diprioritaskan dalam pengambilan keputusan pembuatan peraturan daerah dan penundaan usulan legislatif. Penelitian ini memberi pemahaman baru bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dengan menambah alat bantu berupa digitalisasi saja namun juga perlu diimbangi dengan budaya kerja dan komunikasi antar perangkat daerah yang baik.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa proses pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat masih didominasi oleh pola birokrasi yang kaku dan bergantung pada usulan eksekutif serta instruksi dari pemerintah pusat. Struktur yang kompleks dan pola lama yang dipertahankan menyebabkan durasi legislasi menjadi panjang dan kurang responsif terhadap dinamika lokal.

Penggunaan aplikasi e-Perda belum mampu meningkatkan efektivitas proses pembuatan peraturan daerah, karena masih dijalankan secara formalitas dan tidak mengubah pola kerja yang sudah mengakar.

Di sarankan adanya perbaikan sistem e-Perda kepada Kemendagri agar lebih fungsional dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Inisiatif legislasi daerah dapat ditingkatkan melalui pelatihan bagi anggota DPRD dan penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah dalam menyusun isu strategis. Selain itu, kualitas substansi peraturan daerah perlu ditingkatkan melalui uji publik yang lebih terbuka dan didukung dengan kajian akademik yang mendalam.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu analisis terhadap aplikasi e-Perda masih sebatas prespektif pengguna di tingkat daerah. Perlu penelitian yang lebih mendalam mengenai prespektif Kemendagri sebagai pengelola utama dari sistem tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih menggali permukaan proses pembuatan peraturan daerah dan masih dalam satu prespektif saja, oleh karena itu peneliti menyarankan adanya penelitian yang lebih mendalam dengan melihat berbagai prespektif terkhususnya prespektif Kemendagri sebagai pengelola utama dari sistem e-Perda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azam, B. H., Sugiharto, I., & Asmarudin, I. (2023). Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dalam pembentukan produk hukum daerah. [*Artikel, Vol. 1 No. 1*], 197. http://repository.unissula.ac.id/24976/1/20301900179_fullpdf.pdf
- Bindler, A., & Hjalmarsson, R. (2019). Path dependency in jury decision making. *Journal of the European Economic Association*. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvy046>
- Dona, F. (2022). Dinasti politik di era otonomi daerah dalam perspektif demokrasi. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7, 123–145. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6254>
- Khairi, H., Djohan, D., Kristiadi, J., & Simandjuntak, D. S. (2022). *Otonomi daerah*, 17(6), 1971–2017. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Dwi, O., Rika Tini, L., & Alfiyah, N. I. (2022). Penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019–2024 dalam proses pembuatan peraturan daerah. [*Artikel*], 17(2). <https://kominfo.jatimprov.go.id>
- Hamidov, A., Kasymov, U., Salokhiddinov, A., & Khamidov, M. (2020). Transformation in common-pool resources management in Central Asia: How can intentionality and path dependence explain change in water-management institutions in Uzbekistan? *International Journal of the Commons*, 14(1), 16–29. <https://doi.org/10.5334/ijc.947>
- Indiahono, D. (2021). Public issues in waste affairs in the pandemic era as a challenge for agile bureaucracy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 896(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/896/1/012081>

- Johnson, A. G. (2023). Why are smart destinations not all technology-oriented? Examining the development of smart tourism initiatives based on path dependence. *Current Issues in Tourism*, 26(8), 1282–1294. <https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2053071>
- Lukman, S., & Hakim, A. (2024). Agile governance, digital transformation, and citizen satisfaction moderated by political stability in Indonesia's socio-political landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(1), 210–228. <https://doi.org/10.2307/48771930>
- Madjid, U. (2020). *Manajemen sumber daya aparatur di era reformasi birokrasi*. Bandung: IPDN Press.
- Malpass, P. (2011). Path dependence and the measurement of change in housing policy. *Housing, Theory and Society*, 28(4), 305–319. <https://doi.org/10.1080/14036096.2011.554852>
- Molla, A., Beuving, J., & Ruben, R. (2020). Risk aversion, cooperative membership, and path dependences of smallholder farmers in Ethiopia. *Review of Development Economics*, 24(1), 167–187. <https://doi.org/10.1111/rode.12628>
- Mukminto, E., Martitah, M., Damayanti, R., & Wedhatami, B. (2023). Pelayanan publik versus Covid-19: Partisipasi masyarakat desa dalam pelayanan publik berbasis e-government di masa pandemi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6, 1–16. <https://www.covid19.go.id/2020/04/03/infografis-covid-19-3-april->
- Nurvanza, R. A. (2023). *Pengelolaan pemanfaatan website e-Perda terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD periode 2019–2024 Provinsi Jawa Timur* (Skripsi Sarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Radu, R., & Amon, C. (2021). The governance of 5G infrastructure: Between path dependency and approaches. *Journal of Cybersecurity*, 7(1). <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab017>
- Fiantika, R. F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Rohman, M. N. (2021). Kebijakan pemangkasan struktur birokrasi di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4, 221–232. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i2.5232>
- Schmitter, P. C. (2016). *Political science: Researching a multifaceted topic in essentially contested ways*. United State of America: Edward Elgar Publishing Limited.
- Setterfield, M. (2015). *Path dependency In The New School for Social Research* (Routledge Handbook of Macroeconomic Methodology).
- Simangunsong, F. (2024). *Reformasi birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19470>
- Wasistiono, S. (2021). Penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13, 154–157. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/422>